

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka yang menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, dan yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas mengenai kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Industri Kreatif

I Gusti Bagus Arjana (2016:232) menuliskan bahwa industri kreatif dunia lahir akibat adanya revolusi industri di Inggris yang dipelopori oleh Tony Blair pada tahun 1990-an yang merupakan seorang kandidat Perdana Menteri Inggris. Memasuki awal tahun 1990-an, kota-kota di Inggris mengalami penurunan produktivitas karena beralihnya pusat-pusat industri dan manufaktur ke negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang menawarkan bahan baku, harga produksi, dan jasa yang lebih murah. Akibat fenomena yang terjadi di negaranya, Tony Blair mendirikan sebuah lembaga yang menaungi dan membiayai pengembangan bakat-bakat muda inggris dengan nama NESTA (*National Endowment for Science and the Art*) yang didirikan bersama *New Labour Party*. Pengembangan untuk ekonomi kreatif oleh Blair dilanjutkan dengan dengan dibentuknya *Creative Industries Task Force* oleh *Departemen of Culture, Media, and Sports* (DCMS) pada tahun 1977 ketika Blair menjadi seorang Perdana

Menteri. Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Inggris, yang kemudian pada tahun 1998 untuk pertama kalinya melakukan publikasi hasil pemetaan industri kreatif Inggris. Kemudian industri kreatif ini tengah menjadi fenomena global, karena sektor industri kreatif ini telah berkontribusi terhadap Produk Nasional Bruto (PNB). Hal tersebut disebabkan perkembangan yang pesat dari industri kreatif di beberapa negara seperti China, India, Brazil, Argentina, Meksiko, dan Burkina Faso (Kusinwati, 2019).

DCMS dalam Kusinwati (2019) mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang mengandalkan pada keaslian kreativitas, keterampilan, dan talenta individu yang memiliki kemampuan meningkatkan taraf hidup dan penciptaan kesempatan kerja melalui eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Direktur Pusat Penelitian dan Aplikasi Industri Kreatif Queensland University of Technology 2003-Stuart Cunningham, melihat arti dari industri kreatif melalui input tenaga kerjanya yaitu individu kreatif. Kemudian di Indonesia definisi industri kreatif mengadopsi dari DCMS. Kemendagri (2008) dalam Rosmawaty Sidauruk (2013) mengatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Inti dari industri kreatif meliputi kreativitas, gagasan atau ide, insan kreatif, dan produk kreatif.

Sebagai negara pelopor industri kreatif, Inggris mempunyai cakupan yang luas mengenai industri kreatif sehingga terdapat tiga belas sektor industri kreatif

yang digelar dalam proyek perekonomian negaranya. Namun, tidak lantas memacu kepada negara Inggris, cakupan atau sektor industri kreatif dikontekstualkan kembali kepada kebutuhan masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdapat tujuh belas kegiatan industri kreatif menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di antaranya:

- 1) Pengembang permainan, kemenparekraf mencanangkan untuk pengelolaan *game* yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer ke dalam dunia Pendidikan, memproteksi pegembang lokal, dan membantu dalam mempromosikan karya-karyanya.
- 2) Kriya merupakan sektor dari industri kreatif yang menjadi ciri khas Indonesia yang sangat dengan industri pariwisata dan menyerap tenaga kerja yang optimal. Kriya meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil.
- 3) Desain interior termasuk kedalam sektor industri kreatif yang cakupannya meliputi penggunaan jasa desainer interior hunian, hotel, atau perkantoran.
- 4) Musik sebagai salah satu sektor industri kreatif yang akan dikelola secara lebih maksimal dan memiliki potensi besar. Perlindungan HKI menjadi upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi individu kreatif. Dalam hal ini baik untuk komposer maupun untuk penyanyinya.
- 5) Seni rupa adalah sektor yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan yang terbuat dari batu berharga, aksesoris, perak, emas, kaca, porselin, kain, marmer, dan kayu.

- 6) Desain produk merupakan karya dalam memvisualisasikan produk yang akan dijual dengan kemasan yang kreatif dan menarik. Keahlian, pengetahuan, dan kreativitas akan membantu pelaku industri desain produk untuk bisa bersaing di pasar.
- 7) Fesyen menjadi sektor yang aktual diperbincangkan oleh kaum milenial karena perkembangannya yang mengikuti jaman. Kemenparekraf pula akan melakukan pendampingan melalui fasilitasi-fasilitasi yang akan mendorong sektor industri ini untuk lebih maju.
- 8) Kuliner menjadi sektor penyumbang GDP yang cukup besar bagi negara Indonesia. Bergerak dalam hal makanan dan minuman yang setiap masa nya lahir banyak inovasi yang lebih.
- 9) Film, animasi, dan video dengan perkembangannya yang baik akan mendorong rumah produksi untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan produktivitasnya menggarap film yang berkualitas dari segi cerita dan menguntungkan. Karena perkembangan jaman pula dan era serba mengandalkan teknologi dan permintaan akan video grafis yang meningkat, menjadikan sektor ini menjanjikan dan memiliki prospek yang besar.
- 10) Fotografi menjadi sektor yang diincar oleh generasi muda dan tidak sedikit yang memutuskan untuk menjadi profesional. Upaya kemenparekraf untuk melindungi para fotografer adalah dengan adanya sertifikasi, kemudian perlindungan HAKI terhadap karya-karya fotografi dan meningkatkan eksposur fotografer lokal ke kancah internasional.

- 11) Desain komunikasi visual atau desain grafis mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilik merek, dan kelancaran program-program pemerintah. Praktisi DKV yang dapat memahami pasar, pengetahuan, nilai-nilai lokal, dan memanfaatkan kreativitas yang optimal mampu membawa sektor ini bersaing di pasar internasional.
- 12) Televisi dan radio mencakup tayangan program televisi yang mencari *rating* yang tinggi dalam penayangan programnya. Program yang berkualitas dengan SDM dan rumah produksi yang inovatif, akan membawa sektor ini menembus kancah internasional. Dimana program-program lokal dapat di tayangkan dan dikonsumsi oleh masyarakat internasional.
- 13) Arsitektur memiliki peran yang penting dalam hal budaya, keanekaragaman arsitektur lokal, dan daerah menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai aneka ragam budaya. Arsitektur pula berperan dalam merancang dasar pembangunan sebuah kota.
- 14) Periklanan merupakan medium paling efisien untuk mempublikasikan produk dan jasa. Iklan mempunyai *soft power* yang berperan dalam membentuk pola konsumsi, pola berfikir, dan pola hidup.
- 15) Seni pertunjukan meliputi pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan wayang, tari tradisional, gamelan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat negara.
- 16) Penerbitan berperan aktif dalam membangun kekuatan intelektual bangsa sehingga memunculkan para cendekiawan, peneliti, sastrawan, dan para

penulis. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan karya dapat diterbitkan dan diakses melalui media digital.

- 17) Aplikasi memiliki cakupan di antaranya navigasi, media sosial, berita, bisnis, music, penerjemah, permainan, dan lain sebagainya. Karena masyarakat sudah mampu mengonsumsi alat digital, maka sektor industri kreatif ini mampu menjadi potensi bagi individu kreatif untuk terus mengembangkan dan memajukan sektor tersebut.

Kusinwati (2019) menjelaskan mengenai inti dari industri kreatif bahwa industri kreatif tidak hanya berfokus pada produksi barang dan jasa, tetapi juga terhadap pertukaran, distribusi, dan konsumsi. Industri merupakan sebuah segmentasi dari ekonomi, jadi industri kreatif merupakan subsektor atau bagian yang lebih khusus dan detail dari ekonomi kreatif yang memiliki 17 sektor di dalamnya. Pengimplementasian industri kreatif didukung dan didorong oleh para aktor penggerak industri kreatif yaitu, cendekiawan (*intellectual*), bisnis (*Business*), dan pemerintah (*Government*). Dalam upaya peningkatan keberlanjutan dan kemajuan industri kreatif banyak hal yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para insan kreatif agar terus terdorong untuk menciptakan kreativitas dan karya yang bernilai. Pada 26 April 2011 pemerintah negara Indonesia melakukan konvensi nasional HKI di Istana Negara sebagai penghargaan kepada para insan kreatif.

2.1.2 Ekonomi Industri

Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang terpisah dari disiplin ilmu ekonomi lainnya yang secara khusus mempelajari mengenai perilaku perusahaan-perusahaan industri (Muhammad Teguh, 2016:3). Variabel-variabel dalam ekonomi industri memiliki nilai besaran tertentu yang keberadaannya dapat diukur, dapat ditelusuri, dan dapat diuji di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perekonomian terdapat beberapa hal yang menimbulkan beban biaya ekonomi yang tinggi, namun ada pula yang tidak mengorbankan konsumen. Persoalan utama yang dibahas dalam ekonomi industri yaitu berkaitan dengan perilaku perusahaan-perusahaan industri dalam bersaing. Ilmu ekonomi industri mempelajari berbagai kebijaksanaan perusahaan terhadap pesaing dan pelanggannya di dalam pasar, serta keadaan industri yang bersaing dan kurang bersaing.

Hasibuan dalam Muhammad Teguh (2016:4), Ilmu ekonomi industri apabila dilihat dalam sudut pandang ekonomi mikro merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen atau barang-barang substitusi yang sangat erat. Bahasan mengenai kebijaksanaan dalam ilmu ekonomi industri, ditekankan pada kebijaksanaan *antitrust*. Ilmu ekonomi industri merupakan ilmu ekonomi terapan yang menyajikan bahasan-bahasan sebagai gabungan antara teori-teori ekonomi, peralatan statistik, dan fakta-fakta empiris yang berlaku di sekitar objek yang diamati. Kemudian pembahasan mengenai ekonomi industri ini menggunakan pendekatan-pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Demikian adalah teori, ruang lingkup, dan konsep ekonomi industri

untuk mempelajari ilmu ekonomi industri menghadapi industrialisasi yang terjadi sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Muhammad Teguh (2016:231) revolusi industri dunia pertama kali berasal dari Inggris, dimana terjadi perkembangan besar yang bersifat fundamental dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat. Britania Raya memulai revolusi industri dunia kemudian menyebar ke berbagai benua. Benua Eropa di Eropa Barat, Benua Amerika mencakup Amerika Utara yakni Kanada dan Amerika Serikat, serta Benua Asia di Jepang yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Setiap tahapan revolusi industri ini menghasilkan beberapa penemuan yang menjadi tanda perkembangan dan kemajuannya. Menurut Sharon Q Yang Lili Li (2016), meringkas mengenai sejarah singkat industrialisasi yang terjadi di dunia.

1) Revolusi Industri Pertama

Inggris merupakan negara pelopor revolusi industri yang terjadi antara tahun 1760-an sampai dengan tahun 1840-an. Penemuan mesin uap sebagai awal mula proses revolusioner penggunaan mesin di pabrik untuk menggantikan tenaga kerja manual.

2) Revolusi Industri Kedua

Revolusi ini ditandai dengan penggunaan listrik secara meluas dan mesin pembakaran internal pada tahun 1870-an. Revolusi industri kedua ini mendorong perkembangan kapitalisme di dunia barat.

3) Revolusi Industri Ketiga

Perang Dunia II telah menjadi alasan terjadinya revolusi industri ketiga. Setelah perang terjadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang biologi, komputer, digital, nuklir, ruang angkasa, dan lainnya. Revolusi industri ketiga ini menjadi lompatan besar yang mengubah masyarakat informasi modern.

Transformasi ekonomi diperlukan dalam sebuah negara jika sektor yang awalnya diunggulkan tidak lagi efektif dan efisien dalam menopang perekonomian nasional. Transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke manufaktur diperlukan untuk sebuah kemajuan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*.

Proses industrialisasi harus tetap dimonitoring untuk pertumbuhan yang signifikan. Terdapat lima faktor kunci yang merangsang pertumbuhan industrialisasi dalam suatu negara:

- 1) Tanah, faktor kunci yang meliputi permukaan tanah untuk kepentingan proyek seperti pertanian, pendirian pabrik, atau sarana transportasi. Serta kandungan endogen tanah seperti mineral dan kandungan material mentah yang membantu industri negara tersebut berkembang;
- 2) Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan faktor penting dalam industrialisasi. Karena untuk sebuah proses awal industrialisasi akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, mulai dari pelaku usaha, akuntan, HRD, dan lain sebagainya untuk alasan karena manusia (*men*) merupakan salah satu input produksi;

- 3) Input produksi lainnya yang dibutuhkan dalam industrialisasi adalah modal untuk melaksanakan proses produksi sehingga menghasilkan output dan mencapai tujuan perusahaan;
- 4) Teknologi memiliki peranan penting dalam industrialisasi untuk membantu mekanisasi, memperbaiki proses manufaktur, dan tentunya meningkatkan produktivitas;
- 5) Elemen kunci selanjutnya adalah koneksi. Koneksi merupakan pondasi dan bingkai pertumbuhan ekonomi, meliputi infrastruktur yang merupakan kombinasi antara jaringan transportasi dan komunikasi.

Menurut R Biernacki, proses industrialisasi ditandai dengan transfer besar-besaran tenaga kerja dari pertanian ke pabrik-pabrik yang memiliki konsentrasi peralatan modal. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dikhususkan untuk manufaktur menjadi seimbang dengan peningkatan permintaan barang. Setelah awal industrialisasi lapangan pekerjaan di sektor jasa meningkat lebih cepat daripada manufaktur. Sebuah negara yang sedang melakukan industrialisasi akan terlihat dari proses kerja yang berubah dari manual individu tergantikan oleh produksi massal mekanis dan perakitan. Perubahan dari adanya transformasi ekonomi ke sektor manufaktur tersebut dapat dilihat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang meliputi peningkatan total pendapatan dan standar hidup masyarakat, pembagian kerja yang lebih efisien, dan penggunaan inovasi teknologi. Urbanisasi juga sering terjadi ketika ada proses industrialisasi, disebabkan adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terjadi di pusat industrialisasi suatu negara.

Negara Indonesia bukan satu-satunya negara berkembang yang mengikuti proses Industrialisasi. Sebagai negara yang menginginkan kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat, maka Indonesia melakukan industrialisasi walaupun dalam implementasinya tidak sepenuhnya transformasi dilakukan. Industri sebagai sektor utama tidak lantas mematikan sektor pertanian, karena sebagian besar wilayah Indonesia mengandalkan pertanian dan masih bertumpu pada sektor tersebut. Dalam arti lain sektor industri dan pertanian berdampingan dalam menopang ekonomi nasional. Indonesia mengalami empat tahap industrialisasi yaitu, tahap pertama adalah tahap penguasaan teknologi hingga secara mandiri mampu melakukan perakitan. Tahap kedua adalah tahap sistem lisensi melalui kerja sama dengan industri luar negeri. Tahap ketiga merupakan tahap pengembangan teknologi sendiri. Kemudian tahap keempat adalah tahap pengembangan kemampuan teknologi untuk mendukung ketiga tahap sebelumnya.

Menjalankan proses industrialisasi tentunya diperlukan strategi untuk mencapai tujuan industrialisasi. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua pola strategi untuk melaksanakan proses industrialisasi yaitu, strategi substitusi impor (*inward-looking*) atau orientasi ke dalam yang artinya lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi ke pasar domestik. Kedua, yaitu strategi promosi ekspor (*outward-looking*) atau orientasi ke luar artinya dalam pengembangan industri lebih menekankan ke pasar internasional. Landasan pemikiran mengenai strategi substitusi impor yakni diasumsikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dicapai jika melakukan substitusi barang impor dengan memproduksi barang tersebut di dalam negeri.

Indonesia yang melakukan industrialisasi menerapkan strategi substitusi impor dalam prosesnya sampai dengan pertengahan tahun 1980-an. Pemerintah Indonesia melancarkan strategi ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia di dalam negeri. Kedua, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Ketiga, mendorong perkembangan sektor industri manufaktur dalam negeri. Kelima, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

2.1.3 Teori Ekspor

Mahyus Ekananda (2014:9) mendefinisikan ekspor sebagai aktivitas penjualan barang ke luar negeri yang dilakukan oleh banyak orang, instansi pemerintah, atau perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ekspor dilakukan karena barang tersebut di pasar internasional memiliki nilai yang tinggi atau lebih mahal daripada di dalam negeri. Eksportir akan melakukan ekspor jika ada keuntungan di dalamnya. Dengan adanya aktivitas ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak aktivitas ekspor, maka semakin besar devisa yang diperoleh oleh negara. Umumnya barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri dari dua macam yaitu, migas dan nonmigas.

Mahyus Ekananda (2014:10) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor, baik faktor dari dalam negeri maupun faktor yang berasal dari luar negeri. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Eksportir akan terdorong melakukan ekspor ketika pemerintah memberikan kebijakan kemudahan untuk melakukan proses ekspor. Kemudahan yang diberikan

pemerintah di antaranya berupa penyederhanaan prosedur ekspor, pemberian fasilitas produksi barang-barang ekspor, penghapusan berbagai biaya ekspor, dan penyediaan sarana ekspor.

- 2) Keadaan pasar di luar negeri. Para eksportir cenderung akan menurunkan ekspornya ketika permintaan di pasar internasional lebih sedikit daripada barang yang ditawarkan. Kekuatan permintaan dan penawaran di berbagai negara pula dapat mempengaruhi harga di pasar internasional.
- 3) Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Peluang pasar yang dimanfaatkan secara optimal oleh para eksportir diharapkan akan memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu seorang eksportir harus cerdas dan ahli dalam bidang strategi pemasaran.

2.1.3.1 Kebijakan Ekspor

Kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam melancarkan proses ekspor (Mahyus Ekananda, 2014:10).

- 1) Peningkatan promosi dagang di luar negeri sebagai langkah pengenalan produk di dalam negeri ke pasaran internasional. Kegiatan promosi tersebut dapat berupa pameran dagang/investasi, festival olahraga , seni, maupun aktivitas internasional lainnya yang mampu membawa dan mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri. Promosi dagang tersebut dapat dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah. Untuk menangani mengenai promosi dan informasi, maka pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) perlu membuat lembaga khusus untuk menangani masalah tersebut.

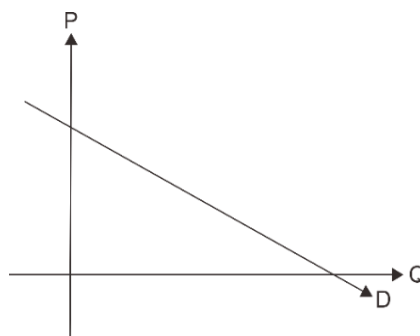
- 2) Peningkatan diplomasi perjanjian dagang internasional untuk memperoleh kepastian. Perjanjian tersebut meliputi kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual. Perjanjian ini menciptakan keuntungan untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu penjual mempunyai pasar yang pasti dan pembeli mempunyai penjual yang pasti.
- 3) Memperluas fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas tersebut di antaranya adalah meningkatkan bahan produksi dengan harga murah.
- 4) Diversifikasi barang ekspor. Perlu melakukan penganekaragaman horizontal, artinya menambah macam barang yang di ekspor dengan barang yang tidak merupakan produk lanjutan dari barang lama. Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri yakni dengan mendorong peningkatan ekspor dengan mengusahakan harga di dalam negeri lebih murah. Langkah yang dilakukan pemerintah antara lain menciptakan tingkat bunga pinjaman yang rendah dan menekan laju inflasi.
- 5) Menghasilkan iklim usaha yang kondusif dengan upaya pemerintah memberikan kemudahan, di antaranya melalui penyederhanaan tata cara atau prosedur ekspor dan penurunan bea ekspor.
- 6) Menjaga kestabilan harga melalui kestabilan kurs valuta asing, agar mempermudah para pedagang internasional dalam meramal nilai rupiah dari hasil ekspornya. Kepastian nilai rupiah (kurs) akan sangat membantu para eksportir untuk menentukan harga tawar-menawar di pasar internasional.
- 7) Sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku ekonomi tentang tata cara melakukan kegiatan ekspor. Banyak produk lokal yang diminati pembeli

pancanegara. Namun, karena pengetahuan mengenai ekspor yang masih minim di kalangan pengusaha kecil dan menengah, proses ekspor belum bisa dilancarkan.

2.1.3.2 Teori Permintaan Ekspor

Blanchard (2006) dalam Mahyus Ekananda (2014:93) menyatakan bahwa ekspor dipengaruhi oleh nilai tukar riil dan pendapatan negara mitra dagang. Apabila pendapatan negara mitra dagang tinggi, maka permintaan akan barang-barang domestik akan meningkat artinya ekspor meningkat. Apabila mata uang domestik terdepresiasi terhadap mata uang negara mitra dagang yang artinya akan ada peningkatan nilai tukar riil, maka permintaan terhadap ekspor akan meningkat. Karena terjadi penurunan harga relatif barang-barang domestik terhadap barang-barang negara mitra dagang.

Dalam transaksi perdagangan harga dan kuantitas menjadi faktor penting yang saling berhubungan. Harga akan menentukan besar kecilnya jumlah barang yang akan dijual. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin rendah permintaan terhadap barang tersebut.



Gambar 2.1 Kurva Permintaan

Sumber: Sukirno, 2016

2.1.4 Teori Perdagangan Internasional

Setiap negara memiliki faktor *endowment* yang berbeda-beda, demi memenuhi kebutuhan setiap negara harus bergantung satu sama lain untuk bisa memenuhi sumber daya yang tidak tersedia di negaranya. Hubungan antarnegara memerlukan sistem dan regulasi yang benar untuk meminimalisasi terjadinya kerugian ataupun eksploitasi, begitu pula dengan perdagangan internasional.

Mahyus Ekananda (2014:3) mendefinisikan perdagangan internasional dalam bukunya “Ekonomi Internasional” yaitu proses aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Banyak teori bermunculan untuk menjelaskan mengenai perdagangan internasional yang kemudian dijadikan rujukan dan referensi dalam pengamalan saat ini. Teori perdagangan internasional klasik dan modern menjadi cikal bakal pemahaman mengenai perdagangan internasional. Teori klasik yang kemudian sangat dikenal di antaranya Teori Merkantilisme, teori David Hume, Teori Adam Smith (*Absolute Advantage*), dan Teori David Ricardo (*Comparative Advantage*). Kemudian dalam sejarahnya teori modern mengenai *international trade* ini di antaranya Teori Heckscher-Ohlin (H-O), Teori Stolper-Samuelson (S-S), Teori Rybczynski, dan Paradoks Leontief.

2.1.4.1 Teori Klasik Perdagangan Internasional

A. Teori Merkantilisme

Merkantilisme merupakan suatu sistem yang umumnya dilakukan di negara-negara di Eropa tentang kebijakan ekonomi untuk mengatur perdagangan internasional serta pembentukan negara nasional. Pelopor dari teori merkantilisme ini

adalah Jean Bodin, Thomas Munn, Colbert, Von Hornick, dan Josiah Child. Teori Merkantilis ini diawali dengan runtuhnya kekuasaan masyarakat ekonomi Feodal. Feodalisme adalah sebuah sistem sosio politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan. Wilayah-wilayah yang bekerja sama dengan para bangsawan dikendalikan oleh mereka sendiri, sehingga inti dari Feodalisme adalah para bangsawan. Sebelum kemudian tergeser dan runtuh dengan adanya pembentukan negara baru yang memiliki anggapan dan cara untuk menjadi negara yang kuat. Sebagai salah satu cara untuk menjadi negara yang kuat dengan mempertahankan negara serta mengembangkan kekuatan negara, maka negara baru tersebut memerlukan angkatan perang yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, banyak biaya yang perlu dikeluarkan baik untuk pengadaan senjata, latihan kemiliteran, pembangunan sarana prasarana, transportasi dan alat militer, serta banyak kebutuhan lainnya. Maka, kaum merkantilis menganggap bahwa biaya tersebut dapat diperoleh dengan menumpuk logam mulia. Karena emas memiliki nilai moneter absolut terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia.

Untuk mencapai tujuan memenuhi pembiayaan demi negara yang kuat melalui penimbunan emas, maka harus dilakukan cara untuk mendapatkan logam mulia yaitu dengan melakukan perdagangan luar negeri dengan meningkatkan ekspor dan meminimalkan impor. Perlu dilakukan kebijakan atau aturan untuk meminimalkan impor yang bertujuan untuk memperluas pasar dan usaha untuk memonopoli perdagangan. Inti dari teori Merkantilis mengenai perdagangan internasional adalah ekspor harus lebih besar daripada impor.

Teori perdagangan internasional oleh kaum merkantilis ini menjelaskan pula adanya peran pemerintah dalam kebijakan perdagangannya. Peranan pemerintah tersebut *pertama* Bullionisme, yaitu peranan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dan pertukaran logam mulia. Kebijakannya mengenai negara yang melarang ekspor emas, perak, dan logam mulia lain oleh individu dan mengatur keluarnya mata uang dari dalam negeri. *Kedua*, Memberikan hak istimewa bagi perusahaan-perusahaan tertentu untuk rute-rute perdagangan sebagai monopoli. Kebijakan ekonomi domestik yang bertujuan untuk menekan produksi yaitu kebijakan upah yang rendah agar produk lebih kompetitif serta mendorong keluarga besar karena tenaga kerja merupakan faktor produksi penting.

B. David Hume

Teori David Hume muncul untuk menentang paham merkantilis dengan kritik yang dikenal dengan *Price Specie Flow Machine* menyangkut naiknya surplus neraca pembayaran. Artinya ekspor lebih besar daripada impor, logam mulia meningkat menyebabkan *Money Supply* meningkat. *Money supply* yang tinggi akan menyebabkan inflasi dalam negeri, jika kadar inflasi tinggi akan merubah kepada harga barang yang naik dan permintaan turun. Akibatnya ekspor akan lebih kecil daripada impor dan logam mulia turun karena daya saing yang turun.

Asumsi-asumsi David Hume mengenai hal ini yaitu permintaan untuk komoditi perdagangan adalah elastis, baik dalam pasar output maupun input pasar memiliki sifat persaingan sempurna, dan berlaku dalam sistem standar emas.

C. Absolute Advantage (Adam Smith)

Adam Smith (1776) dalam bukunya “*The Wealth of Nation*” dalam Mahyus Ekananda (2014:20) memandang kesejahteraan negara ditentukan oleh kapasitas produksi yang menyangkut:

- 1) Intervensi pemerintah terhadap perekonomian kecil;
- 2) Laissez Faire yang dijalankan di dalam negeri dan perdagangan bebas dengan negara lain akan menciptakan lingkungan yang mendorong kesejahteraan negara dengan ditandai kekayaan negara yang bertambah;
- 3) Menerapkan sistem *International Division of Labor Specialisation* untuk memberikan perluasan pasar bagi barang yang diproduksi sehingga mengakibatkan adanya spesialisasi internasional. Oleh karena itu setiap negara akan meningkatkan produksi barang dan jasa tertentu sesuai dengan keuntungan maksimum.

Teori ini pula menjelaskan bahwa ukuran kemakmuran suatu negara tidak diukur pada penguasaan logam mulia, melainkan pada GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri maka campur tangan pemerintah harus dikurangi untuk nantinya tercipta *Free Trade*. *Free Trade* akan memicu adanya persaingan yang ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara melakukan spesialisasi berdasarkan *Absolut Advantage*. Spesialisasi ini akan memacu produktivitas dan efisiensi sehingga meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri yang identik dengan peningkatan kemakmuran.

Absolute Advantage atau keuntungan mutlak yaitu suatu ukuran dalam sebuah perdagangan internasional jika negara tersebut dapat memproduksi suatu jenis barang dengan jam atau hari kerja yang lebih sedikit dibandingkan jika barang tersebut diproduksi oleh negara lain. Artinya jika barang tersebut memiliki manfaat *absolute advantage* maka akan dilakukan ekspor, dan akan melakukan impor jika negara tersebut tidak memiliki keuntungan mutlak (*absolute disadvantage*). Asumsi mengenai *absolute advantage* ini yaitu faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama, pertukaran dilakukan secara barter, dan biaya transportasi diabaikan.

D. Comparative Advantage

Teori keunggulan komparatif merupakan teori perdagangan internasional yang lebih maju yang diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817. Teori ini berisi hukum mengenai ekspor-impor yang belum banyak tantangan dan aplikasi dalam praktik perdagangan internasional, Mahyus Ekananda (2014:23). Teori ini merupakan teori yang menyempurnakan teori Adam Smith. Menurut Adam Smith negara yang tidak memiliki keuntungan absolut tidak bisa melakukan perdagangan internasional, sedangkan pandangan David Ricardo negara tersebut mungkin melakukan perdagangan. Teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, namun dengan syarat di kedua negara mempunyai harga komparatif yang berbeda. David Ricardo dalam argumennya menyatakan bahwa sebaiknya semua negara berspesialisasi dalam komoditi-komoditi dimana negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor komoditi-komoditi yang memiliki kerugian

komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut, namun cukup memiliki keunggulan komparatif. Karena setiap negara akan melakukan spesialisasi karena teknologi yang telah maju. Teknologi yang maju dimiliki oleh negara maju yang lebih efisien, dengan demikian negara berkembang tidak bisa berdagang. Pandangan tersebut menjadi kritik terhadap Adam Smith bahwasannya negara berkembang pun bisa melakukan perdagangan dengan hanya memiliki keunggulan komparatif.

Mahyus Ekananda (2014:25) David Ricardo berdasarkan keunggulan komparatifnya pada beberapa asumsi, yaitu:

- 1) Hanya terdapat dua negara (bilateral) dan dua komoditi;
- 2) Terdapat perdagangan bebas (*free trade*);
- 3) Adanya mobilitas tenaga kerja yang sempurna (*perfect mobility*), biaya produksi konstan, dan tidak ada biaya transportasi;
- 4) Teknologi tetap;
- 5) Menggunakan terapan teori tenaga kerja

Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan memproduksi suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan negara akan mengimpor barang yang jika diproduksi dalam negeri mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Teori ini pula menyatakan bahawa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut.

2.1.4.2 Teori Modern Perdagangan Internasional

A. Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Dalam peradaban mengenai perkembangan teori perdagangan internasional, terdapat beberapa hal yang membedakan teori klasik dan modern. Teori klasik melihat hanya dari sisi *supply* yaitu dari sisi produsen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sedangkan teori modern melihat sisi *supply* dan *demand*, suatu negara kan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor barang yang input utamanya relatif sangat banyak dan impor barang yang input utamanya tidak dimiliki negara tersebut (Lindert dan Pugel, 1996) dalam Mahyus Ekananda (2014:62). Teori modern Heckscher dan Ohlin (H-O) mengatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena *opportunity cost* yang berbeda di antara kedua negara, diakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimiliki kedua negara tersebut.

Teori H-O ini sering disebut dengan teori proporsi dan intensitas faktor produksi. Teori H-O menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi (faktor *endowment*) yang dimiliki oleh masing-masing negara, selanjutnya faktor produksi menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau mudah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barang tersebut. Sebaliknya masing-masing negara akan melakukan impor untuk barang yang langka dan mahal biaya produksinya. Faktor *endowment* yang dimaksud adalah faktor tanah, faktor manusia, dan faktor modal.

B. Teori Stolper-Samuelson (S-S)

Teori Stolper-Samuelson (S-S) adalah teori yang menentang pendapat H-O. Teori S-S membuktikan bahwa teori H-O tidak benar yang menyatakan bahwa negara yang mensuplai faktor produksi yang langka justru akan memperoleh keuntungan pendapatan riil dalam nilai absolut dan merentangkan proteksi yang dapat menghambat lajunya impor, sehingga konsumen secara keseluruhan dirugikan dalam memenuhi preferensinya. Teori S-S mengatakan bahwa peningkatan pada harga komoditas akan meningkatkan pendapatan riil faktor (input) yang dipakai secara intensif pada suatu sektor dan menurunkan pendapatan riil faktor (input) lain (Mahyus Ekananda, 2014:67). Secara khusus menjelaskan bahwa tarif akan meningkatkan pendapatan bagi faktor produksi yang digunakan secara intensif terhadap barang-barang yang menerima proteksi.

C. Teori Rybczynski

Teori Rybczynski menjelaskan mengenai peningkatan dalam suatu faktor produksi pendukung (*endowment factor*) akan menurunkan intensitas dari faktor produksi barang yang lain. Oleh karena itu apabila terjadi penambahan proporsi pada suatu input yang digunakan secara intensif akan menimbulkan penambahan proporsi output yang besar lagi pada sektor tertentu, dan akan terjadi pengangguran output yang menggunakan faktor input konstan non intensif. Namun, dengan asumsi tidak ada pembalikan intensitas faktor, diversifikasi produksi, dan konstan komoditas dari harga barang tersebut.

D. Paradoks Leontief

Wassily Leontief merupakan penemu fakta mengenai struktur perdagangan luar negeri (ekspor-impor) pada tahun 1953 melalui studi empiris yang dilakukannya, sehingga membuat Leontief menjadi seorang pelopor dalam analisis input-output matriks. Paradoks Leontief hadir karena saat itu hal ini merupakan teori yang bertentangan dengan teori H-O di Amerika Serikat. Para ahli ekonomi perdagangan internasional melakukan penelitian lebih lanjut mengenai paradoks Leontief, kemudian ditemukan empat sebab utama. Pertama, intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Kedua, *tariff and non-tariff barrier*. Ketiga, perbedaan dalam *skill and human capital*. Keempat, perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Kelebihan teori ini adalah ekspor akan lebih banyak jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja terdidik. Namun sebaliknya, jika negara tersebut kurang memiliki tenaga kerja terdidik maka ekspornya akan lebih sedikit.

2.1.5 Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sadono Sukirno, 2016:34). Dalam sebuah perekonomian sebuah negara baik negara berkembang maupun negara maju, barang dan jasa bukan hanya diproduksi oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi juga oleh penduduk negara lain. Akan ada produksi nasional yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri.

Perusahaan multinasional yang menyediakan modal, tenaga ahli, dan teknologi telah membantu menaikkan nilai tambah barang dan jasa di negara perusahaan itu berdiri. Karena setiap produksi yang disumbangkan oleh perusahaan

multinasional yang berdiri di negara tersebut akan dihitung dalam pendapatan nasional. Hal tersebut karena PDB adalah nilai barang dan jasa dalam satu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing.

Sadono Sukirno (2016:33-34) menyatakan bahwa terdapat tiga cara perhitungan pendapatan nasional yang dapat digunakan, yaitu:

a. Cara pengeluaran

Pendapatan nasional yang dihitung menggunakan cara pengeluaran adalah dengan cara menjumlahkan nilai pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut. Pratama dan Mandalla (2014) dalam Izzuddin Muhammad (2018) mengatakan terdapat lima jenis pengeluaran, yaitu:

$$\text{PDB} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{X}-\text{M})$$

Keterangan:

C = konsumsi rumah tangga

I = investasi

G = konsumsi pemerintah

X = ekspor

M = impor

Menurut Sadono Sukirno (2016:37) kegunaan data PDB dengan perhitungan cara pengeluaran, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran tingkat keparahan permasalahan ekonomi yang dihadapi negara tersebut dan mengukur tingkat pertumbuhan yang dicapai, serta tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati.
- 2) Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

b. Cara produksi atau cara produk netto

Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Tujuan penghitungan PDB menggunakan cara produksi ini adalah:

- 1) untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi dalam mewujudkan pendapatan nasional;
- 2) sebagai salah satu cara menghindari perhitungan dua kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

c. Cara pendapatan

Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Pratama dan Mandalla (2014) dalam Izzuddin Muhammad (2018) hal tersebut dapat digambarkan dalam fungsi produksi:

$$Q = f(L, K, U, E)$$

Keterangan:

Q = *output*

L = tenaga kerja

K = barang modal

U = finansial/uang

E = kemampuan kewirausahaan

Kemudian, dalam menghasilkan *output* menggunakan faktor produksi terdapat balas jasa atas setiap penggunaan faktor produksi tersebut. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut pendapatan nasional (PN).

$$PN = w + i + r + \pi$$

Keterangan:

w = upah/gaji

i = suku bunga

r = sewa

π = keuntungan

2.1.6 Nilai Tukar

Mahyus Ekananda (2014:168) mendefinisikan nilai tukar (*foreign exchange rate*) sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Dapat diartikan pula nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Kurs mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ada pada sisi permintaan dan

penawaran kedua mata uang tersebut. Pergerakan kurs mata uang akan berdampak pada nilai komoditi dan aset, sebab kurs dapat mempengaruhi jumlah arus kas masuk yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan, serta memengaruhi jumlah arus keluar kas yang digunakan untuk membayar impor (Mahyus Ekananda, 2014:168). Terdapat beberapa kondisi kurs dalam perekonomian akibat dari fungsi kurs adalah untuk mengukur nilai satu satuan mata uang terhadap mata uang lain. Kurs terdepresiasi (*depreciation*) ketika harga mata uang domestik menurun terhadap mata uang asing dan akan mengalami apresiasi (*appreciation*) ketika harga mata uang domestik naik terhadap mata uang asing.

2.1.6.1 Jenis-Jenis Nilai Tukar

Jenis-jenis nilai tukar digunakan untuk kepentingan bisnis internasional. Pergerakan kurs mata uang yang selalu berubah-ubah akan mempengaruhi perusahaan multinasional, karena kurs dapat mempengaruhi jumlah arus kas masuk yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan, dan juga dapat memengaruhi jumlah arus kas keluar yang digunakan untuk membayar impor (Mahyus Ekananda, 2014:177-178).

Mahyus Ekananda (2014:178) terdapat beberapa istilah nilai tukar, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai tukar nominal

Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang di antara dua negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per mata uang asing, misalnya 1 USD = 15000 Rupiah). Dalam nilai tukar pula dikenal dengan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai mata

uang domestik terhadap nilai mata uang asing yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Istilah devaluasi hanya berlaku dalam sistem nilai tukar tetap dimana suatu mata uang dikaitkan dengan mata uang asing tertentu.

b. Nilai tukar riil

Nilai tukar riil adalah harga relatif dari suatu barang di antara dua negara. Nilai tukar riil menunjukkan suatu nilai tukar barang di suatu negara dengan negara lain (*term of trade*). Nilai tukar riil dapat mengukur daya saing suatu negara di pasar internasional. Depresiasi riil berarti bahwa harga-harga di luar negeri yang dinyatakan dalam satuan mata uang domestik telah meningkat relatif terhadap harga-harga barang yang diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut menandakan negara kita memiliki daya saing keluar yang kuat, namun dengan catatan faktor-faktor lain dianggap tetap. Kondisi ini menandakan barang-barang domestik menjadi relatif lebih murah terhadap barang-barang impor, baik bagi kita maupun bagi masyarakat luar negeri.

c. Nilai tukar efektif riil

Nilai tukar efektif merupakan pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu mata uang riil terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing. Nilai tukar efektif pula merupakan rata-rata dari kelompok mata uang asing dan dapat dinilai sebagai sebuah ukuran keseluruhan dari daya saing terhadap luar negeri.

2.1.6.2 Keseimbangan Nilai Tukar

Menurut Mahyus Ekananda (2014:180) terdapat dua keseimbangan nilai tukar yaitu nilai tukar keseimbangan fundamental dan nilai tukar keseimbangan perilaku, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Fundamental Equilibrium Exchange Rate* (FEER)

FEER adalah pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada fundamental suatu negara. Keseimbangan internal tercermin dalam suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi mendekati atau mencapai potensial *output*, dengan tingkat pengangguran yang cukup rendah yang disertai dengan tidak adanya perubahan perilaku masyarakat. Tekanan inflasi pada kondisi tersebut mendekati nol. Selanjutnya, keseimbangan eksternal dicapai apabila *saving* dan *investment* dalam tingkat normal.

b. *Behavioral Equilibrium Exchange Rate* (BEER)

BEER adalah nilai tukar yang diukur atas perilaku-perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun non fundamental. Clark dan MacDonald (1998) dalam Mahyus Ekananda (2014:180) menyatakan pendekatan ini menjelaskan bahwa model BEER merupakan salah satu turunan model yang dapat menangkap baik pengaruh faktor fundamental ekonomi maupun non-ekonomi. *Country risk* merupakan faktor nonekonomi dalam model BEER yang akan memengaruhi keseimbangan nilai tukar. Pendekatan ini pula memperhatikan perilaku nilai tukar riil efektif untuk memperoleh nilai tukar keseimbangan yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian.

2.1.7 Teori Suku Bunga

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar bank atau peminjam lainnya untuk pemanfaatan uang selama satu jangka waktu tertentu (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus: 332, 1985). Sedangkan Mahyus Ekananda (2014:234) mendefinisikan suku bunga sebagai ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh pemilik modal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik modal. Kebijakan bunga rendah akan mendorong masyarakat untuk memilih konsumsi dan investasinya daripada menabung. Sebaliknya masyarakat akan lebih memilih menabung ketika tingkat suku bunga simpanan tinggi.

Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant (1999) terdapat dua macam suku bunga, yaitu:

- a. Suku bunga nominal yang menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamnya;
- b. Suku bunga riil yang menjelaskan bahwa selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi, dimana rasio daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam lebih ditekankan oleh suku bunga riil. Suku bunga riil merupakan suku bunga setelah dikurangi inflasi ($\text{suku bunga nominal} - \text{ekspektasi inflasi}$).

2.1.7.1 BI Rate

Penentuan tingkat suku bunga BI Rate di Indonesia sebagai pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI satu bulan hasil lelang operasi pasar terbuka yang berada di sekitar BI

Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang kemudian diumumkan kepada publik. Bank Indonesia mempunyai hak penuh atas penguasaan kebijakan moneter dimana akan memungkinkan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang ditetapkan.

2.1.7.2 Fungsi Tingkat Suku Bunga

Sunariyah (2013:81) dalam D.A. Dwi Rahmawati dan Wahyu Hidayat (2017) Menyatakan tiga fungsi tingkat suku bunga, yaitu:

- a. Sebagai daya tarik untuk melakukan investasi;
- b. Sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian;
- c. Memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar.

2.1.8 Inflasi

Perekonomian memiliki beberapa masalah, salah satunya adalah masalah inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Sadono Sukirno (2016:14) menyatakan inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi terbentuk karena beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Kondisi tersebut dapat dijelaskan ketika konsumen ingin dan mampu melakukan penawaran harga yang tinggi untuk

mendapatkan barang tersebut dan penjual yang menahan barangnya yang hanya menjual kepada konsumen yang berani membayar dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kenaikan harga-harga. Kemudian para pekerja yang menuntut kenaikan upah. Ketika tuntutan akan kenaikan upah berlaku secara meluas, maka akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan untuk menaikkan harga-harga barang mereka. Kedua masalah tersebut biasanya berlaku ketika kondisi perekonomian dalam *full employment*. Karena dalam perekonomian yang sudah maju, masalah inflasi erat kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja.

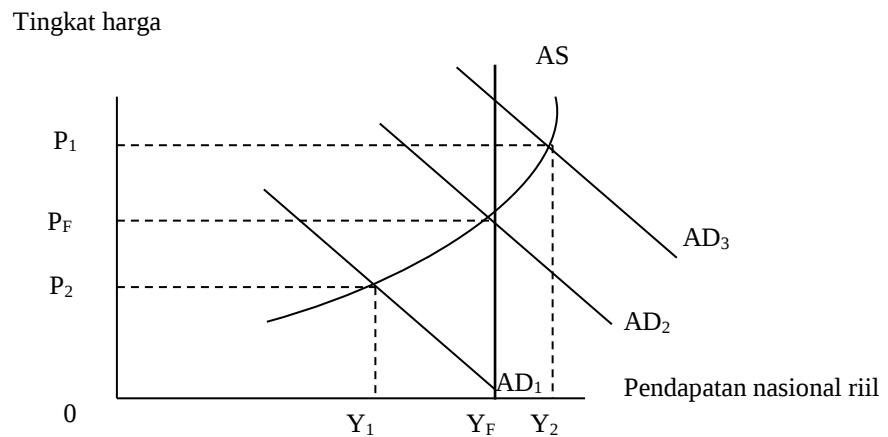
2.1.8.1 Klasifikasi Inflasi

Sadono Sukirno (2016: 333, 337) menyatakan beberapa klasifikasi inflasi, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku yang dibedakan menjadi tiga bentuk. Kemudian berdasarkan tingkat laju inflasi yang dibedakan kepada tiga golongan yaitu inflasi merayap, inflasi *moderate*, dan *hyperinflation*.

Inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya:

1) Inflasi tarikan permintaan

Ketika perekonomian dalam kondisi perkembangan yang pesat, inflasi tarikan permintaan sering kali terjadi. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat kepadatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan akan menimbulkan inflasi.



Gambar 2.2 Kurva Inflasi Tarikan Permintaan

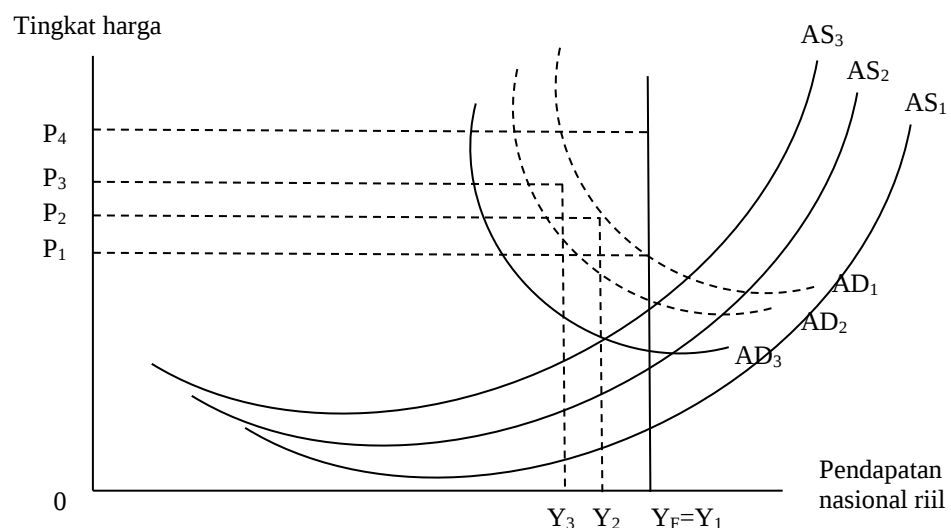
Sumber: Sukirno, 2016

Inflasi tarikan permintaan dapat berlaku pula ketika masa perang dan ketidakstabilan politik yang terus menerus. Pemerintah berbelanja terlalu melebihi pajak yang dibebankan kepada rakyatnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran maka pemerintah akan melakukan pinjaman ke bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Keadaan demikianlah akan mewujudkan inflasi.

2) Inflasi desakan biaya

Inflasi desakan biaya terjadi ketika tingkat pengangguran sangat rendah (Sukirno, 2016:334). Ketika permintaan terus-menerus bertambah dan perusahaan masih menghadapi keadaan tersebut. Sebagai akibat dari pemenuhan permintaan, maka akan dilakukan peningkatan produksi untuk pemenuhan permintaan konsumen. Ketika terjadi peningkatan produksi

maka akan terjadi pula kenaikan biaya produksi. Perusahaan akan menaikkan tingkat upah/gaji pekerja untuk menahan mereka agar tidak melakukan pemberhentian kerja dan akan mencari pekerja baru dengan tawaran upah yang tinggi pula. Kondisi ini didesak akibat keharusan perusahaan dalam pemenuhan permintaan konsumen. Namun, dengan demikian maka akan terjadi kenaikan harga-harga akibat pembagian beban karena biaya produksi yang meningkat pula.



Gambar 2.3 Kurva Inflasi Desakan Biaya

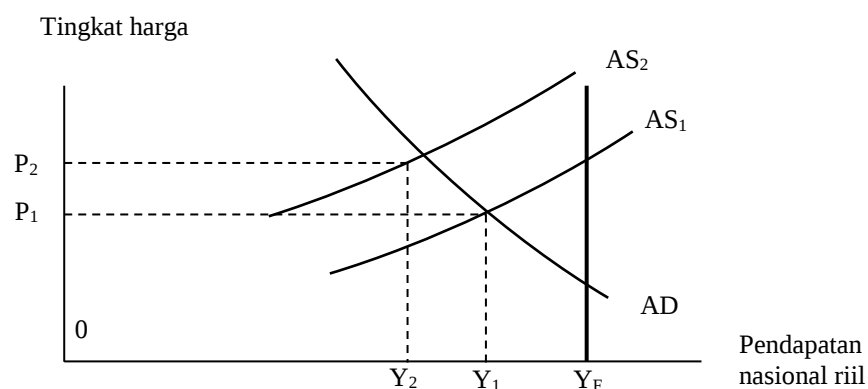
Sumber: Sukirno, 2016

3) Inflasi diimpor

Inflasi dapat pula terjadi akibat dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Dalam perusahaan terdapat barang-barang yang memiliki peranan penting dalam kegiatan pengeluarannya. Salah satu contoh dalam inflasi yang diimpor adalah efek kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada proses produksi barang-barang industri. Akibat dari kenaikan harga minyak tersebut, maka

biaya produksi pula meningkat. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga-harga meningkat. Kenaikan harga barang yang tinggi dan hampir dirasakan oleh seluruh negara di belahan dunia, kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya stagflasi yaitu inflasi yang terjadi ketika tingkat pengangguran tinggi di berbagai negara.

Stagflasi mengakibatkan penurunan pendapatan nasional, kenaikan pengangguran yang tinggi, dan tingkat inflasi mencapai lebih dari 70%. Inflasi ini terjadi akibat kemerosotan nilai mata uang rupiah yang sangat besar dan ketidakstabilan politik karena penurunan nilai mata uang yang drastis tersebut (Sukirno, 2016:336).



Gambar 2.4 Kurva Inflasi Diimpor dan Stagflasi

Sumber: Sukirno, 2016

Inflasi berdasarkan tingkat kelajuan, dibedakan menjadi tiga golongan:

1) Inflasi merayap

Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat, dimana kenaikan harga tidak melebihi 2 atau 3 persen setahun.

2) Inflasi Sederhana (*moderate inflation*)

Tingkat inflasi ini mencapai 5-10% dimana ini merupakan tingkat inflasi yang rata-rata dialami oleh setiap negara.

3) *Hyperinflation*

Inflasi tingkat ini adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat.

2.1.8.2 Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Inflasi perlu dikendalikan untuk tetap pada posisi yang diinginkan. Oleh karena itu peran pemerintah dan otoritas keuangan sangat penting untuk mengendalikan laju inflasi, yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

1) Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi

Kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan untuk mengatasi inflasi adalah dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah (Sukirno, 2016:345). Ketika pertambahan pengeluaran agregat besar, maka akan menyebabkan tingkat inflasi bertambah cepat. Pemerintah akan mencoba mengatasinya dengan cara mengurangi pertambahan agregat yang berlaku atau mengurangi pengeluaran. Jika kebijakan fiskal ini berhasil maka akan mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh.

2) Kebijakan moneter untuk mengatasi masalah inflasi

Kebijakan moneter akan melakukan penurunan penawaran uang untuk mengatasi inflasi yang terjadi. Perubahan ini akan menaikkan suku bunga. Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan dan penanaman

modal baru akan mengurangi kegiatan investasinya. Kenaikan suku bunga akan mengurangi rumah tangga untuk membeli rumah baru dan mengurangi investasi perusahaan. Sebagai akibatnya hal tersebut akan mengurangi pengeluaran konsumen. Kesempatan kerja penuh akan tercapai dan tingkat inflasi dapat dikendalikan atau harga tidak mengalami kenaikan yang drastis.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Analisis Determinasi Ekspor Industri Kreatif Indonesia Tahun 2006-2020. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ray Fani Arning Putri, Suhadak, dan Sri Sulasmiyati (2016) Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia Komoditi Tekstil dan Elektronika ke	Independen: 1. Inflasi 2. Nilai Tukar	Dependen: 2. Ekspor Tekstil 3. Ekspor Elektronika Independen: 1. PDB 2. Tingkat Suku Bunga	Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap ekspor Indonesia komoditi elektronika ke Korea Selatan sebelum AKFTA tahun	Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35, No. 1 Juni 2016 Hal. 127-136

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Korea Selatan (Studi Sebelum dan Setelah ASEAN Korea Free Trade Agreement Tahun 2011)			2011 namun sisanya tidak berpengaruh secara signifikan.	
2	Parell Tua Halomoan, Simanjuntak Zainul Arifin, Mukhammad Kholid Mawardi (2017) Pengaruh Produksi, Harga Internasional dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Volume Ekspor Rumput Laut Indonesia (Studi pada tahun 2009 ± 2014)	Independen: 1. Nilai Tukar	Dependen: 1. Ekspor Rumput Laut Dependen: 1. Produksi 2. Harga Internasional 3. Tingkat Suku Bunga 4. Inflasi 5. PDB	Hasil uji simultan (Uji-F) menunjukkan bahwa Produksi, Harga Internasional dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor Rumput Laut Indonesia. Hasil uji parsial (Uji t), menunjukkan bahwa variabel produksi dan harga internasional tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan, variabel Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Volume Ekspor Rumput Laut Indonesia	Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 50, No. 3 September 2017 Hal. 163-170
3	Islahwani Loka Vita Resti dan Anugerah Karta Monika	Independen: 1. PDB	Dependen: 1. Ekspor Ekonomi Kreatif	Hasil peramalan ekspor ekonomi kreatif menunjukkan	Jurnal Ekonomi dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2020) Potensi Ekspor Ekonomi Kreatif Tahun 2019		Independen: 1. Tingkat suku bunga 2. Nilai Tukar 3. Inflasi	peningkatan sebesar 0,70 miliar USD di tahun 2019. Meskipun demikian, kenaikan nilai ekspor ekonomi kreatif ini belum mampu meningkatkan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif yang diharapkan pertumbuhannya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.	Pembangunan Vol. 28, No. 1 (2020) Hal. 29-40
4	Okta Rabiana R, T. Zulham, dan Taufiq C. Dawood (2018) Pengaruh Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor di Indonesia	Independen: 1. Suku Bunga 2. PDB 3. Nilai Tukar	Dependen: Ekspor	Suku bunga kredit dan nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor, sedangkan produk domestik bruto mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ekspor.	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 2, September 2018 ISSN: 2502-6976
5	Nurul Alinda (2013) Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi	Independen: 1. PDB 2. Nilai tukar	Dependen: 1. Ekspor karet Independen: 1. Tingkat Suku	PDB dan inflasi berpengaruh positif, sedangkan nilai mempunyai pengaruh negatif terhadap	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11, No. 01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekspor Karet Di Indonesia		2. Inflasi	ekspor karet di Indonesia.	Juni 2013 Hal. 92-101
6	Desak Putu Emmei Juliantari dan Nyoman Djinar Setiawina (2015) Analisis Pengaruh Kurs Dollar Amerika Serikat, Inflasi, dan Penanaman Modal Asing Terhadap Nilai Ekspor Makanan dan Minuman di Indonesia	Independen: 1. Nilai Tukar 2. Inflasi	Dependen: 1. Ekspor Makanan dan Minuman Indonesia Independen: 1. Tingkat Suku Bunga 2. PDB	Kurs dollar amerika serikat, inflasi dan penanaman modal asing secara simultan berpengaruh terhadap nilai ekspor makanan dan minuman di indonesia pada periode 1992-2014; variabel kurs dollar amerika serikat dan PMA berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor makanan dan minuman di Indonesia pada periode 1992-2014; kurs dollar amerika serikat merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap nilai ekspor makanan dan minuman Indonesia	E Journal EP Unud, 4 [12]: 1507-1529 ISSN: 2303-0178

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Joddy Herlambang, Nur Barokah, Endang Sulistyani (2016) Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Foreign Direct Investment (Fdi), Domestic Direct Investment (Ddi) dan Tingkat Inflasi Terhadap Ekspor Industri Kreatif Indonesia pada Tahun 2011-2015 ()	Dependen: 1. Ekspor Industri Kreatif Independen: 1. Nilai Tukar 2. Inflasi	Independen: 1. PDB 2. Tingkat Suku Bunga 3. FDI 4. DDI	Secara simultan variabel nilai tukar rupiah, <i>foreign direct investment</i> (FDI), <i>domestic direct investment</i> (DDI), dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap nilai ekspor industri kreatif indonesia Secara parsial, nilai tukar rupiah dan <i>domestic direct investment</i> (DDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor industri kreatif Indonesia. Sedangkan variabel <i>foreign direct investment</i> (FDI) dan tingkat inflasi indonesia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor industri kreatif Indonesia.	<i>Journal of Business Studies</i> , 2 [2], 2016 Hal. 52-64
8	Ratna, Kadarisman dan Edy (2015)	Independen: 1. Nilai Tukar	Dependen: 1. Ekspor Kakao Indonesia ke	Terdapat pengaruh yang signifikan antara produksi kakao domestik	Jurnal Administrasi Vol. 27,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Produksi Kakao Domestik, Harga Kakao Internasional, dan Nilai Tukar Terhadap Ekspor Kakao Indonesia ke Amerika Serikat (Studi Pada Ekspor Kakao Periode Tahun 2010-2013)		Amerika Serikat Independen: 1. Harga Internasional 2. Produksi 3. Tingkat Suku Bunga 4. Inflasi 5. PDB	terhadap ekspor kakao Indonesia ke Amerika Serikat dengan nilai taraf signifikan yang dihasilkan sebesar 0,003 harga kakao internasional terhadap ekspor kakao Indonesia ke Amerika Serikat yang lebih kecil dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu sebesar 0,05. Sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar terhadap ekspor kakao Indonesia ke Amerika Serikat terdapat pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai taraf signifikan yang dihasilkan sebesar 0,325 lebih besar dari taraf signifikan yang disyaratkan yaitu sebesar 0,05.	No. 1 Oktober 2015; p.1-8; https://administrasi.bisnis.studentjournal.ub.ac.id
9	Azmy, Edy dan Yusi (2016) Pengaruh Harga Tembakau	Dependen: 1. Nilai Tukar	Independen: 1. Ekspor Tembakau Indonesia	Perkembangan nilai ekspor tembakau Indonesia mengalami peningkatan	Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 38, No. 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Internasional, Jumlah Produksi Domestik, dan Nilai Tukar Terhadap Nilai Ekspor Tembakau Indonesia (Studi Ekspor Tembakau Indonesia Tahun 1985-2014)		Dependen: 1. Harga Interanasi onal 2. Jumlah Produksi 3. PDB 4. Tingkat Suku Bunga 5. Inflasi	diakibatkan kenaikan harga tembakau internasional yang terus naik dan karena naiknya produktivitas perkebunan tembakau. Variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai ekspor tembakau Indonesia. Secara parsial harga internasional, jumlah produksi dan nilai tukar berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap nilai ekspor tembakau Indonesia. Namun, variabel jumlah produksi memiliki hubungan negatif terhadap nilai ekspor tembakau Indonesia.	September 2016; p.23-31; https://administrasi.bisnis.studentjournal.ub.ac.id
10	Agnes Putri Sonia dan Nyoman Djinar Setiawina	Independen: 1. Nilai Tukar 2. Inflasi	Dependen: 1. Ekspor 2. Impor	Kurs mempunyai pengaruh tidak positif terhadap	E Journal EP Unud, 5 [10]: 1077-1102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2016) Pengaruh Kurs, JUB, dan Tingkat Inflasi terhadap Ekspor, Impor, dan Cadangan Devisa Indonesia		3. Cadangan Devisa Independen: 1. Tingkat Suku Bunga 2. PDB	ekspor dan tingkat inflasi berpengaruh tidak negatif terhadap ekspor	ISSN: 2303-0178

2.3 Kerangka Pemikiran

Desain penelitian yang dibentuk untuk menemukan pengaruh produk domestik bruto, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi terhadap ekspor industri kreatif Indonesia tahun 2006-2020. Ekspor merupakan salah satu jalan untuk bisa menghasilkan devisa bagi negara termasuk ekspor industri kreatif.

2.3.1 Hubungan PDB dan Ekspor

Ekspor merupakan komponen penting yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ekspor pula menjadi komponen pembentuk dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam teori makroekonomi rumus pembentuk pendapatan nasional adalah $PDB = C + I + G + (X - M)$. Menurut Okta Rabiana R dkk., (2018) PDB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ekspor.

Ekspor akan terdorong dan lebih tinggi dari sebelumnya ketika PDB mengalami peningkatan. Peningkatan PDB akan membuat perekonomian semakin membaik. Ekonomi yang membaik artinya sektor industri akan mengalami peningkatan yang akan mendorong untuk melakukan ekspor. Kemudian mekanisme lain yang menunjukkan hubungan PDB dan ekspor adalah PDB akan meningkatkan daya beli konsumen yang secara tidak langsung akan menaikkan

nilai tukar dan rupiah mengalami depresiasi. Ketika rupiah terdepresiasi, maka akan terdorong untuk melakukan ekspor (Debora Silvia H. dan Junaidi, 2020).

2.3.2 Hubungan Nilai Tukar dan Ekspor

Nilai tukar merupakan salah satu variabel yang nilainya selalu berubah. Penurunan atau kenaikan nilai tukar akan berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan internasional. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi (melemah) maka akan mengakibatkan harga barang-barang di negara lain menjadi lebih murah di pasaran internasional, sedangkan harga barang-barang negara lain menjadi relatif lebih mahal di pasar domestik. Karena negara importir menganggap harga barang di negara eksportir lebih murah akibat dari menurunnya harga relatif dari negara tersebut, maka ekspor akan meningkat akibat tingginya permintaan. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah mengalami apresiasi (peningkatan) maka ekspor akan menurun karena negara importir menganggap harga barang-barang dan jasa di negara eksportir mahal. Oleh karena itu nilai tukar mempunyai hubungan yang negatif signifikan terhadap ekspor. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Parell Tua Halomoan Simanjuntak dkk., (2017).

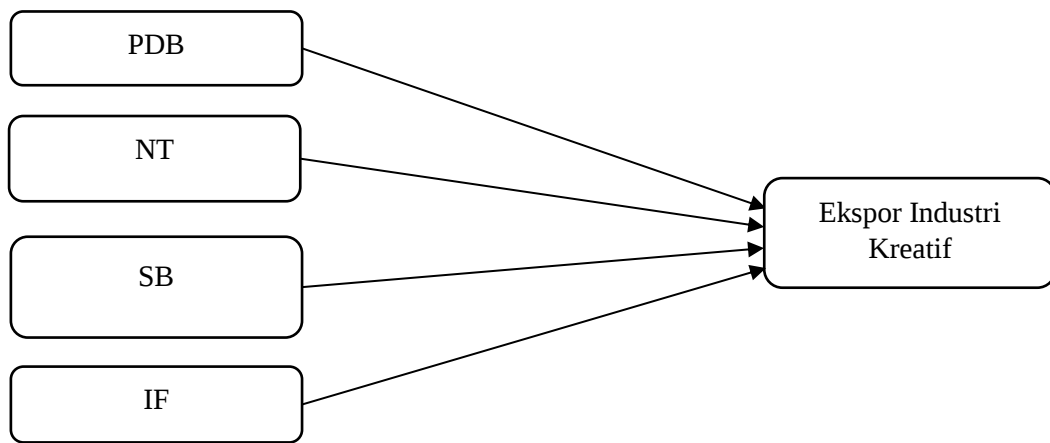
2.3.3 Hubungan Tingkat Suku Bunga dan Ekspor

Edward (2001) dalam I Gede Yoga Mahendra dan I Wayan Wita Kesumajaya (2015) menjelaskan bahwa besar kecilnya modal kerja yang ingin didapat oleh para eksportir tergantung dari tingkat suku bunga kredit. Antara tingkat suku bunga dan ekspor memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ekspor, ketika terjadi kenaikan suku bunga kredit maka ekspor turun. Artinya ketika suku bunga pinjaman naik, maka pinjaman produsen untuk melakukan produksi turun,

hal tersebut menyebabkan penurunan ekspor. Penelitian terdahulu dari Okta Rabiana Risma, T. Zulham, dan Taufiq C. Dawood (2018).

2.3.4 Hubungan Inflasi dan Ekspor

Sukirno (2002) dalam Silitonga dkk., (2017) mengatakan bahwa terjadinya inflasi memicu pertumbuhan impor lebih cepat berkembang dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor. Dalam arti lain bahwa inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap ekspor. Ketika inflasi mengalami kenaikan, maka ekspor akan cenderung menurun (Sukirno, 2002) dalam Silitonga dkk., (2017). Penurunan ekspor tersebut disebabkan dari efek inflasi karena harga-harga barang di dalam negeri menjadi lebih mahal dari luar negeri, maka cenderung menambah impor sehingga berdampak ke permintaan valuta asing yang bertambah. Para eksportir akan mengurangi ekspor karena barang ekspor yang cenderung mahal. Kemalahalan tersebut terjadi akibat dari inflasi yang menyebabkan biaya produksi menjadi lebih mahal. Biaya produksi yang mahal, akan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Sesuai dengan teori permintaan, ketika harga naik maka permintaan akan turun. Masyarakat akan lebih memilih barang substitusi dengan penawaran yang lebih murah atau lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Akibatnya impor akan naik dan ekspor menurun, serta permintaan akan valuta asing akan bertambah seiring dengan permintaan barang impor yang meningkat. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu dari Joddy Herlambang, Nur Barokah, dan Endang Sulistyani (2016) bahwa tingkat inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap ekspor.



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hasil studi terdahulu tentang ekspor subsektor industri kreatif pada sektor ekonomi kreatif, maka dalam kajian penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDB berpengaruh positif sedangkan nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif terhadap ekspor industri kreatif Indonesia tahun 2006-2020.
2. Diduga secara bersama-sama PDB, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi berpengaruh terhadap ekspor industri kreatif Indonesia tahun 2006-2020

